A
V

AS SIYASAH
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
E ISSN: 2549-1865

Vol. 9 No. 1 Bulan Mei Tahun 2024

https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/index

Jurnalfisipuniska@gmail.com

AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI DESA TAJAMULYA KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN

Puput Valentin [1)*],Isabella[2)], Amaliatulwalidain[3)]
[1)* 2) 3)] Universitas Indo Global Mandiri
email: puputvlntnnn10gmail.com
Corresponding Author*

DOI : 10.31602/as.v9i1.12781

Riwayat Artikel

Diterima : 13 Oktober 2024
Disetujui : 23 Mei 2024
Diterbitkan :31 Mei 2024

Hal : 86 - 92

Abstract

This study aims to find out how the village head is accountable for road construction in Taja Mulya Village, Betung District, Banyuasin Regency. In this study, researchers used qualitative methods because the data generated in this study were in the form of written and spoken words so that they were able to describe the situation in Taja Mulya Village. Thequalitative method approach used by researchers in this study is a case study, data collection techniques consist of three methods, namely observation, interviews, documentation. And data analysis techniques by processing, reading all the data, starting coding all the data, applying the coding process, then showing how the descriptions and themes are expressed in the form of narrative and data analysis. This study uses the theory of accountability from Syahrudin Rasul, there are 5 (five) indicators, namely 1. Honesty and Law 2. Managerial 3. Program 4. Policy 5. Finance. the results of the research it was found that the accountability of the village head inroad construction in Taja Mulya Village was not effective enough because there were still many damaged roads and also many roads that had not been cast or were still in dirt. The problems in the road construction process are constrained funds for the construction and repair of village roads so that road construction carried out in villages uses more funds from third parties such as the aspirations of the DPRD. The suggestion in this research is that the village government is more concerned with and pays more attention to the condition of village road construction and prioritizes the construction of damaged roads in order to facilitate access to schools and to the gardens where the community works.

Keywords**:** *Accountability, Development of village infrastructure, Village roads*

This is an open-access article under the CC-BY 4.0 License. Copyright © 2024 by Journal As Siyasah

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pemerintah desa pada Pasal 23 Kepala desa berkewajiban terhadap pelaksanaan pemerintahan desa,pengembangan desa, Sebagai kepala desa dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan desa, seseorang harus mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya, termasuk tugas pembangunan multidimensi.

Pada dasarnya akuntabilitas pemerintah desa terhadap program pembangunan fisik merupakan contoh nyata yang langsung terlihat hasilnya. Selain itu, masyarakat juga dapat

mengetahui secara langsung apakah pelayanan public terkait program. Pembangunan desa adalah keseluruhan susunan serta alur perubahan yang dilaksanakan secara teratur serta terancang selama metode pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Tujuan pembangunan desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinandengan mengembangkan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal dan keterpaduan sumber daya alam, kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai arus masuk.

Akuntabilitas adalah kewajiban pejabat untuk melaporkan kepada warga negara tentang aktivitasnya dan hak publik untuk mengambil tindakan terhadap pejabatyang tidak memuaskan warga negara dalam menjalankan tugasnya. Pembangunan infrastrukturmerupakan salah satu strategi guna mencapai tujuan nasional. Maka fokus penting ialah pembangunan ekonomi dan sosial, yang berkaitan terhadap kehidupan masyarakatnya. Berbagai rencana pengembangan telahberulang kali menunjukkan kekuatan dan kelemahan industri. Ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara adalah tercapainyatujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan neraca pembayaran mengukur keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana akuntabilitas Kepala Desa dan perangkat desa desa sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terdapat pada lokasi penelitian, yang mana beberapa penelitian dilakukan di kota Semarang, Banten, Medan, dan lainnya.Tetapi dalam penelitian ini akan mengambil sudut pandang yang berbeda yaitu memfokuskan penelitian Akuntabilitas Kepala Desa dan perangkat desa di Desa Taja Mulya KecamatanBetung Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan teori Akuntabilitas dariSyahrudin Rasul. Yaitu dengan melihat akuntabilitas Kepala Desa dan perangkatnya karena melihat kesuksesan suatu pembangunan jalan desa tergantung dengan kinerja dan tanggung jawab Kepala Desa dan perangkatnya.

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban kepala desa dan perangkatnya untukmemberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, kepada pihak yang berhak dan berhak atas pertanggungjawaban tersebut.Kepala desa dan lembaganya diharuskan atauberkewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaanatau penegakan kebijakan yang diamanatkan oleh entitas pelapor untuk mencapai tujuanyang ditentukan atau ditetapkan secara teratur.

Menurut Mahmudi (2016:19) dimensi akuntabilitas memiliki 5 indikator yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas hukum yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang menjadi syarat di dalam organisasi. Akuntabilitas kejujuran yaitu penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.
2. Akuntabilitas Manajerial, disebut juga akuntabilitas kinerja terkait dengan pertanggungjawaban untuk melaksanakan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas Program, terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan merupakan program yang bermutu mendukungstrategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Organisasi sektor publik harus mempertanggungjawaban program yang telah disusun.
4. Akuntabilitas Kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus pertimbangkan apa saja tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan. Akuntabilitas Keuangan, terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana politik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan melakukan survey lapangan sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif dan tepat mengenai peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Informan pada penelitian ini yang akan dilaksanakan di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin

Metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini:

1. Pengamatan
   Metode ini melibatkan mencatat tentang sesuatu yang berkaitan dengan judul dan secara langsung mengamati objek tertentu yang menjadi subjek penelitian.
2. Wawancara
   Mencari informasi dengan mengajukanpertanyaan kepada responden atau tanya jawab untuk mendapat informasi lebih detail tentang hal-hal yang diketahui responden.
3. Dokumentasi
   Melibatkan melihat laporan untuk mengumpulkan data atau informasi tentangberbagai topik terkait penelitian

Analisis data ini merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data yang berhasil di dapat, kemudian akan diolah sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang ingin dicapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana metode ini akan menggali lebih dalam terkait permasalahan yang sedang diteliti, menjadikan manusia sebagai mahluk yang memiliki kesadaran dan intensional dalam melakukan sesuatu dan melihat sesuatu di balik yang terlihat (Saleh,2017:2)

Dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan tehnik dari Creswell (2020:264-268) yang menjelaskan enam langkah analisis datasebagai berikut:

1. Pengelolaan data serta penyiapan data untuk analisis, langkah ini memerlukan salinan hasil wawancara, penyaringan bahan, penulisan data lapangan, pemilihan dan penyusunan data sesuai dengan sifatnya berdasarkan data yang diperoleh.
2. Baca semua informasi, kemudian pikirkan arti dari apa yang dikatakan peserta secara keseluruhan dan buat catatan penting tentang gagasan umum yang diperoleh.
3. Pengkodean semua informasi, dimana proses pengkodean adalah pengorganisasian atau pengelompokan informasi melalui kumpulan teks.
4. Terapkan proses pengkodean untuk menentukan antara setting (area), orang (peserta), kategori dan topik yang akan ditulis.
5. Memaknai sebuah data. Bertujuan membantu penulis mengungkapkan esensi dari sebuahgagasan. Hal tersebut bisa berupa makna yang muncul dari perbandingan antar hasil penelitian dengan informasi yang berkaitan denganliteratur dan teori.

PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan jalan belum cukup baik dan maksimal. Karena hasil wawancara yang mendalam dengan melakukan observasi langsung berpedoman dengan teori akuntabilitas yaitu indikator program, dan menggunakan teoriPembangunan infrastruktur desa dengan indicator (1) perencanaan (2) pelaksanaan (3) pengawasan. Program terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan merupakan program yang bermutu mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Organisasi sektor publik harus mempertanggungjawaban program yang telah disusun. Perencanaan, dapat diartikan sebagai suatu konsep yang direncanakan dan dikoordinasikan secara sistematis oleh suatu instansi tertentu untuk mencapai tujuannya. Pelaksanaan, Strategi yang memandang masyarakat tidak hanya sebagai target tetapi juga sebagai pelaku yang mampu menetapkan tujuan. Pengawasan, proses untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana, tugas, tujuan, dan kebijakan yang ditetapkan

tercapai dikenal sebagai pengawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Program

Pada indikator ini peneliti menarik kesimpulan bahwa Kepala Desa dan perangkatnya bekerja sama dan menyerahkan seluruh pembangunan jalan desa kepada pihak DPRD disebabkan terkendala nya dana untuk pembangunan jalan

Gambar 1.1
Rancangan Pembangunan Jalan Desa Yang Dibangun Oleh Dana Desa



2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	3	unit	95.660.400,00	DDS
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			95.660.400,00	
2.03.14.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			1.250.000,00	
2.03.14.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			1.250.000,00	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			22.935.200,00	
2.03.14.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.000.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			9.530.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			11.605.200,00	
2.03.14.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			1.800.000,00	
2.03.14.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			71.475.200,00	
2.03.14.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			23.700.000,00	
2.03.14.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			43.175.200,00	
2.03.14.	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			4.600.000,00	

Sumber: Kantor Desa Taja Mulya 2022

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Pembangunan jalan desa tidak menggunakan dana desa. Dan juga yang saya amati pemerintah desa dan Kepala Desa juga kurang memerhatikan kondisi dan pembangunan jalan desa dan pihak DPRD juga memberikan wewenangnya untuk membangun jalan desa jadi pemerintah desa mengambil kesempatan dengan memberikan seluruh pembangunan jalan desa melalui rapat reses setiap enam bulan sekali.

Gambar 1.2
Rapat Reses Pihak Desa dan DPRD



Sumber: Kantor Desa Taja Mulya 2023

Dari hasil penelitian dan observasidengan menggunakan indikator program dapat disimpulkan Kepala Desa dan perangkatnya bekerja sama dan menyerahkan seluruh pembangunan jalan desa kepada pihak DPRD disebabkan terkendala nya dana untuk pembangunan jalan, dan juga yang saya amati pemerintah desa dan Kepala Desa juga kurang memerhatikan kondisi dan pembangunan jalan desa dan pihak DPRD juga memberikan wewenangnya untuk membangun jalan desa jadi pemerintah desa mengambil kesempatan dengan memberikan seluruh pembangunanjalan desa melalui rapat reses setiap enam bulan sekali.

Pembangunan Infrastruktur DesaPerencanaan

Pada indikator ini peneliti menarik kesimpulan bahwasannya pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan jalan kurang paham karena kurangnya edukasi dari perangkat desa kepada masyarakat serta pembebasan lahanyang masih jadi permasalahan karena kurangnya pengertian dan dana dari pemerintah akan hal itu.

Dan juga pembangunan jalan di desa tersebut belum efektif karena bahan bangunan yang digunakan untuk mengecor jalan terlihat tidak bagus karena jalan yang sudah di cor dalam beberapa bulan akan hancur lagi. Jadi jalan yang sudah di cor dan rusak akan jadi jalan batu koral sehingga membuat akses jalan jadi sulit.

Gambar 1.3
Keadaan jalan setelah beberapa bulandibangun



Sumber: Hasil Observasi 2023

Pelaksanaan

Hasil dari indikator ini kesemipulan peneliti yaitu terkait dengan bagaimana perangkat desa menjalankan program-program

yang direncanakan dan melaksanakan Pembangunan sesuai dengan yang direncanakan dan dengan hasil wawancara tersebut bahwasannya masih banyaknya jalan desa yang belum layak dan masih perlu banyak perbaikan dari pihak desa apalagi kebanyakan jalan yang dibangunan di desa ini banyak dibangun oleh aspirasi DPRD. Seharusnya pemerintah desa lebih banyak mengintropeksi dan segera memudahkan akses.

Pengawasan

Pada inidkator ini peneliti menarik kesimpulan bahwa pengawasan Kepala Desa terhadap pembangunan jalan sudah dilakukan sendiri oleh Kepala Desa, dilihat dari adanya pembangunan yang dilakukan ataupun adanya gotong royong itu dilakukan oleh Kepala Desa langsung. Akan tetapi, setelah pembangunanjalan yang dilakukan setelahnya tidak ada pengawasan atau pemeliharaan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan pemerintah desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan Kepala Desa terhadap pembangunan jalan sudah efektif dan terlaksana tetapi tidak akan pemeliharaan untuk pembangunan jalan yang sudah dilaksanakan.

KESIMPULAN

Pembangunan di infrastruktur desa dapat di simpulkan akuntabilitas Kepala Desa dalam pembangunan jalan Desa Taja Mulya belum efektif karena dengan adanya program Reses DPRD yang dilakukan enam bulan sekali untuk pembangunan pihak desa memberikan semua pembangunan jalan desakepada pihak DPRD. Sehingga pihak desa hanya mementingkan pembangunan lain seperti gedung serbaguna, gedung kesenian, Gedung Olahraga, dan lainnya. Jalan yang dibangun oleh aspirasi DPRD juga tidak sepenuhnya baik karena pembangunan jalan yang dilakukan oleh pihak DPRD dalam beberapa bulan akan rusak kembali.

Pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan jalan kurang paham karena kurangnya edukasi dari perangkat desa kepada masyarakat serta pembebasan lahan yang masih jadi permasalahan karena kurangnya pengertiandan dana dari pemerintah akan hal itu. Perangkat desa juga melaksanakan program sesuai dengan perencanaan. Serta Pengawasan Kepala Desa terhadap pembangunan jalansudah efektif dan terlaksana. Akan tetapi, setelah pembangunan jalan yang dilakukan setelahnya tidak ada pengawasan atau pemeliharaan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan pemerintah desa. Berdasarkan penelitian ini adapaunsaran yang diajukan oleh peneliti yaitu (1) Pemerintah desa agar lebih meningkatkan upaya mem-pertanggungjawabkan akuntabiltas pengelolaan keuangan desa dengan melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban secara transparansi. (2) Pemerintah desa agar lebih mementingkan dan lebih memerhatikan kondisi pembangunan jalan desa serta mendahulukan pembangunan jalan yang rusak agar memudahkan akses ke sekolah serta ke kebun tempat masyarakat bekerja. (3) Lebih mempertanggungjawabkan dana anggaranyang telah diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan jalan. (4) Mampu mengedukasi masyarakat agar memahami tentang pembangunan jalan sehingga masyarakat ikut turut serta dalam pembangunan jalan karena peran masyarakat dalam pembangunan jalan juga penting untuk mencapai tujuannya.

REFERENSI

Afiah, E. T., Rohayati, R., & Nurizki, A. T. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Dalam MeningkatkanPembangunan Desa Di Desa Ciherang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang–Banten. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, *12*(2), 237-240.

Asri, G. J. (2018). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban JawaTimur* (Doctoral dissertation, University of MuhammadiyahMalang).

Azizah,W.,& Andayani,A. (2022). Akuntabilitas DanTransparansi Pengelolaa Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntan.*

Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus

Kabupaten Semarang. *JurnalEdunomika*, *3*(02), 287-299.

Edy Suhardono (2018). Teori Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, Dyah R. Panuju (2009). Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah. Jakarta,Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., & Suprapto, S. (2019). Analisis Undang-undang Desa. *DIALEKTIKA:Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, *4*(1), 1-14.

Fidratan,A. (2020). *Peran Kepala Desa Dalam Menanganai Konflik Sosial di Ohoi Garara Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara* (Doctoral dissertation, IAIN Ambon).

Hanif Nurcholis (2011). Pertumbuhan dan PenyelenggaraanPemerintah Desa, Jakarta, Erlangga.

I Nyoman Sutarja MS (2014), Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Berbasis Ergonomi Total Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Universitas Udayana Bali.

Jhon W. Creswell, Johanna Creswell Baez (2020). 30 Essensial Skills For The Qualitative Researcher (2nd ed). Sage Publications, IncEnglish.

Latif, A., Rusdi, M., & Setiawan, D. (2020). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng.

Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, *8*(1), 26-39.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa bertanggung jawab atas pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Mengenai PeraturanPelaksanaan Pembangunan.

Pitriyati, P., Ifansyah, M. N., & Firdaus, M.R. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Didesa Garunggung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB*, *1* (2), 566-579.

Rahmadani, I. A., Setiawati, B., & Suwandi, S. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa DalamPembangunan Fisik di DesaTelaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *JAPB*, *3*(1), 67-80.

Rumegang, G., Kaawoan, J. E., & Sumampow,I. (2021). Efektivitas Musrembang Dalam Perencanaan Pembangunan. Infrastuktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud. *GOVERNANCE*, *1*(2).

Salma, S. A., Putri, V. A., Fikri, A. F., & Nawangsari, E. R. (2021). Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan PembangunanDi Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation*, *2*(05), 681-695.

Sari, N., Arifin, J., & Suparti, H. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Telaga Itar Kecamamatan KeluaKabupaten Tabalong. *JAPB*, *3*(2), 491-502.

Sasmito, C. (2019). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6 (3).*

Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan Konsep,Dimensi,dan Strateginya*. Jakarta PT Bukit Aksara.

Siregar, M. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaankeuangan desa terhadappembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, *4*(2), 59-59.

Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, *9*(2), 131-142.

Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan infrastruktur terhadap ketimpanga ekonomi antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, *6*(2),115-130.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 8 tentang Pembangunan Desa upaya peningkatan kualitas hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26-30 Pemerintah terdiri atasPemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.

Wahyu, N. S. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan AlokasiDana Desa (ADD), Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa dengan Peran Kepala Desa sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Desa Tumpukan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten)* (Doctoral dissertation, Universitas WidyaDharma Klaten).

Wiranata, A. A., Isabella, I., & Kencana, N. (2019). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, *4*(3).